



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 7 November 2019
Pukul	: 19.00 WIB – selesai
Acara	: Melanjutkan Acara Rapat tanggal 6 November 2019
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 47 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, beserta jajaran; C. Ketua Dewan Pengawasan BPJS Kesehatan diwakili oleh Anggota Dewan Pengawas, Dra. Sri Hartati, MBA, beserta jajaran; D. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dr.dr. Fachmi Idris, M.Kes, beserta jajaran; E. Ketua DJSN, Tubagus Achmad Choesni, beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua DJSN dibuka pukul 19.25 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI, setelah mendengar aspirasi masyarakat, tetap konsisten terhadap hasil Kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, dengan Menteri Koordinator Bidang PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan pada tanggal 2 September 2019 untuk tidak menaikkan premi JKN bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III selambat – lambatnya tanggal 31 Desember 2019.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk memfinalisasi *data cleansing* terhadap sisa data PBI APBN bermasalah Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Aset Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selambat – lambatnya akhir November 2019.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Sosial RI, dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan *data cleansing* terhadap 96,8 juta data Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena adanya *exclusion error* (kesalahan eksklusi) dan *inclusion error* (kesalahan inklusi) dalam penetapan sasaran PBI.
5. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mencari penyelesaian permasalahan pemenuhan hak jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
6. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh Indonesia selambat – lambatnya 18 Desember 2019.

7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Akreditasi Rumah Sakit khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga *International Society for Quality in Health Care* (ISQua).
8. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim rumah sakit – rumah sakit di seluruh Indonesia.
9. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan jumlah tempat tidur (TT) kelas III di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
10. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk merevisi Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 02.25 WIB.

Jakarta, 7 November 2019

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,

TTD.

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE
A-393

